



**POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam**

**ISSN : 2621-0312**

Vol. I No. I, 2018

Doi: 10.21043/politea.v1i1.4485

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea>

---

## **MELAWAN PRASANGKA DALAM KONTESTASI POLITIK: Kajian Psikologi Politik Islam**

**Saliyo**

IAIN Kudus

[saliyo@iainkudus.ac.id/saliyo41876@gmail.com](mailto:saliyo@iainkudus.ac.id/saliyo41876@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This article has the purpose of integrating Western theories with the teachings of Islam. The theory is the theory of prejudice in political psychology with Islamic teachings in the al-Qur'an and Hadist. The both al-Quran and Hadist are the two main sources of the study of Islamic psychology. The prejudice of terms in political psychology is compatible with the terms *suu dhon* and *khusnu dhon* in Islamic political psychology. This research includes literature research. The research included the category of qualitative research. The analysis used with deductive inductive analysis. The work of researchers in data collection and analysis involves six stages: the first, researchers look for material information related to the subject. The second explores the themes that are appropriate to the theme chosen by the researcher. The Thirdly, the analysis of existing knowledge information is repeated. The Fourth, an unnecessary reduction of data. The fifth verification data by the researcher. The sixth conducted a discussion of the theme findings. Finally make a conclusion. The results of the study show that political behavior in political psychology or Islamic political psychology is the origin of behavior that can lead to conflict, mobs and can enter legal institutions. Discipline, maturity, and being a person in politics can be seen when one can be cautious in applying bias in public places. The effects of the application of the theory of psychological prejudice can be seen from anxiety, emotions, division strategies, human needs for achievement, affiliation, and power.*

**Keywords:** *Prejudice, Political Contestation, and Islamic Political Psychology.*

## Pendahuluan

Pada tahun ini tahun 2018-2019 Indonesia memasuki tahun politik. Dikatakan tahun politik karena Indonesia akan merayakan pesta demokrasi secara serempak pemilihan eksekutif yaitu pemilihan presiden, dan pemilihan legislatif yaitu pemilihan dewan perwakilan rakyat tingkat nasional dan daerah tingkat provinsi dan kabupaten serta anggota dewan perwakilan daerah. Pelaksanaan pemilihan umum secara serempak dengan pemilihan legislatif dan eksekutif direncanakan akan diadakan pada tanggal 17 April 2019. Tahun 2018 akhir yaitu tepatnya 13 oktober 2018 sampai dengan 13 April 2019. Awal dari tahun tersebut merupakan hari-hari yang sah untuk digunakan sebagai kegiatan kampanye.

Itulah alasan mengapa bulan-bulan akhir tahun 2018, dan bulan-bulan awal 2019 di Indonesia merupakan bulan-bulan politik. Alasannya karena pada bulan tersebut ada kegiatan politik yang dinamakan dengan kegiatan kampanye. Pada kegiatan kampanye di bulan-bulan tersebut bukan berarti bulan yang tidak memiliki masalah. Bulan tersebut banyak pemasalahan karena pada bulan tersebut masing-masing kontestasi politik menawarkan program agar dalam pilihan nanti dapat dipilih. Hal yang tidak terelakan dalam kontestasi tersebut saling mengintip kelemahan lawan sebagai sarana serangan untuk menjatuhkan lawan. Kondisi yang demikian dapat terjadi pada kontestasi pemilihan legislatif maupun eksekutif secara serempak di Indonesia.

Banyak hal yang bisa terjadi pada bulan politik di Indonesia yang dapat mengancam tidak stabilitasnya pemerintahan. Di antaranya yang bisa terjadi dan mungkin banyak terjadi adanya kampanye hitam *black campaign*, bermain sebagai korban *playing victim* agar mendapatkan simpati dari pemilih pada masing-masing calon kandidat legislatif ataupun eksekutif. Kegiatan kampanye hitam yang lazim dilakukan pada era teknologi informasi yang banyak ditemukan dengan berita yang negatif pada salah satu calon baik legislatif ataupun eksekutif dengan istilah berita hoak. Berita-berita yang demikian memang cukup merugikan yang diberitakan dengan berita kejahatan ataupun perilaku yang tidak bermoral. Pada hal orang yang diberitakan tidak melakukannya. Sisi lain yang berbahaya dalam situasi bulan-bulan politik adalah tingkat emosi yang tinggi pada calon legislatif ataupun eksekutif yang mudah menyulutkan amarah bagi pendukungnya. Kemarahan tersebut dapat terjadi karena terganggu adanya permasalahan agama, suku, etnik, budaya.

Penjelasan tersebut cukup beralasan bahwa bangsa kita bangsa Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman warga negaranya dari budaya, agama, bahasa, warna kulit, dan suku. Menurut data Dirjen perikanan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan keragaman hayati, budaya, adat, bahasa, suku. Luas daratan bangsa Indonesia mencapai tingkat luas 1.926.337 km persegi. Wilayah perairan bangsa Indonesia mencapai 5.8 juta km persegi dengan panjang pantai 80.791 km persegi. Bangsa Indonesia memiliki pulau sebanyak 17.508 buah. Pulau tersebut dihuni oleh manusia kurang lebih sebanyak 250 juta manusia. Jumlah penduduk tersebut sebagian besar berdomisili di pulau Jawa, Madura, dan Bali sekitar 60%.

Jumlah suku warga Negara Indonesia untuk saat ini yang telah diketahui sekitar 300 suku. Masing masing suku tersebut memiliki adat dan agama dengan keragaman yang ada di Indonesia. Kondisi yang demikian merupakan modal dasar kekayaan bangsa Indonesia yang positif apabila dapat dikelola dengan baik dengan kehidupan yang rukun antar sesama.

Sebaliknya keadaan yang demikian juga merupakan modal akan munculnya kerikil-kerikil tajam yang dapat mengakibatkan adanya konflik antar manusia dari suku, agama, budaya dan adat yang berbeda.

Perbincangan yang demikian yang telah diulas di atas bukan isapan jempol semata. Prediksi yang demikian dimungkinkan akan mudah terjadi kapan saja dan dimana saja. Kejadian tersebut terjadi karena di dalam interaksi pergaulan sehari-hari lebih mengedepankan kebenarannya sendiri dan keunggulan yang dimilikinya tanpa menghargai adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh setiap suku, agama, budaya, warna kulit masing-masing warga Indonesia. Contoh konflik yang telah meletus di Indonesia adalah konflik di Poso, Sambas, Irian Jaya, Maluku, Lombok, Aceh dan lain sebagainya (Kuncoro, 2008, p. 1).

Permasalahan yang lain yang dengan mudah menyulut api konflik adalah adanya prasangka dalam kontestasi politik tahun ini. Kejadian yang demikian merupakan hal yang lazim, dan dapat dimiliki oleh setiap orang. Permasalahannya setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Pemikiran yang demikian dapat menyulut terjadi konflik apabila penyakit prasangka berlebihan dimiliki oleh seseorang baik secara individu ataupun kelompok. Sebaliknya prasangka dengan sewajarnya tanpa dilatarbelakangi rasa permusuhan ataupun emosi yang marah, maka prasangka yang dimiliki oleh orang tersebut dapat terkendali dengan baik.

Apabila dikaji secara mendalam sebenarnya kajian tentang tema prasangka merupakan kajian yang berkaitan dengan tema konflik. Kajian masalah prasangka berkaitan dengan dua hal yang perlu diperhatikan yaitu prasangka merupakan akar adanya motivasi berperang sebagai ekspresi dari emosi seseorang. Selanjutnya kajian prasangka untuk mencari solusi bagaimana mengurangi adanya kegiatan prasangka yang berlebihan yang dapat mengakibatkan adanya permusuhan.

Penelitian yang dilakukan oleh Borgadus pada tahun 1923 menunjukkan bahwa ada kejadian konflik yang terbuka antara kelompok imigran. Penelitian yang lain dilakukan oleh Katz dan Braly pada tahun 1935. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa prasangka merupakan ekspresi emosi yang terbuka dengan mengekspresikan sesuatu yang negatif dan stereotip. Penelitian yang lain dilakukan oleh Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, dan Sanford pada tahun 1950. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa partisipan yang memiliki prasangka mudah melakukan permusuhan dan melakukan kekerasan. Perilaku yang demikian sebagai ekspresi dari adanya prasangka yang dimiliki oleh orang tersebut.

Kasus-kasus yang demikian sebagaimana telah dipaparkan memang tidak jauh dari perilaku prasangka pada orang lain pada aspek agama, ras, etnik, budaya dan adat istiadat serta suku yang dimiliki oleh orang lain baik secara kelompok ataupun individu. Kejadian yang di Amerika sebagian besar seseorang yang banyak memiliki prasangka pada orang lain baik secara kelompok ataupun individu akan memunculkan perilaku yang negatif. Perilaku-perilaku tersebut seperti perilaku menindas, diskriminatif dan lain sebagainya.

Ilmu psikologi secara lebih luas dan mendalam telah banyak mengkaji tentang perilaku prasangka. Teori yang dikaji dalam ilmu psikologi lebih banyak pada pembahasan tentang permasalahan dan fenomena prasangka. Tema tema tentang prasangka pada jurnal *prejudice* yang membahas tentang pengalaman-pengalaman terjadinya prasangka dan ekspresi dari

prasangka itu sendiri. Perkembangan selanjutnya kajian yang dibahas dalam tema *prejudice* ada ekspresi dari perilaku *prejudice* dan perilaku kekerasan akibat dari prasangka (Crandall & Eshleman, 1996, p. 237).

Permasalahan prasangka dapat terjadi pada siapa saja. Sebagai contoh pada permasalahan yang sederhana ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain. Ada seseorang yang bertemu dengan seseorang yang berkulit hitam. Orang tersebut belum mengenalnya sebelumnya. Selanjut dibenak pikiran orang yang bertemu akan beribu prasangka. Prasangka pada orang yang baru bertemu dengan orang hitam tersebut dapat bersifat psikologis dan fisik. Sebagai contoh secara psikis maka orang yang baru bertemu dalam pikirannya bisa terbesit orang hitam tersebut orang yang humoris, jahat, sensitif, intelektual, ataupun pemalu.

Prasangka secara fisik orang yang baru bertemu dengan orang yang hitam dapat terbesit dalam pikirannya bahwa orang tersebut kuat, suka olah raga, berlari cepat, kuat dalam berkelahi, kuat bekerja. Pikiran-pikiran tersebut sudah biasa terbesit dalam pikiran seseorang. Kondisi yang demikian dalam respon seseorang kepada orang lain dinamakan dengan prasangka. Apakah seseorang tidak boleh berprasangka?. Orang memiliki pikiran prasangka itu boleh, tetapi tidak boleh berlebihan. Permasalahannya prasangka juga bagian dari kewaspadaan seseorang pada orang lain yang belum banyak mengenalnya.

Secara lebih luas perlakuan dalam pikiran seseorang ketika seseorang melakukan diskriminasi baik secara kelompok ataupun individu kepada orang lain karena tidak adanya informasi secara utuh yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki prasangka. Sebagai contoh prasangka yang terjadi pada benak pikiran seseorang karena tidak memahami secara mendalam apa yang ada dalam anggota kelompoknya ataupun di luar kelompoknya. Begitu juga secara individu orang yang memiliki prasangka juga karena tidak begitu banyak memahami tentang keadaan individu tersebut secara mendalam (Kaiser, Cheryl & Wilkins, 2010, p. 462).

Lebih jelas paparan di atas bahwa prasangka merupakan tema kajian yang banyak dikaji dalam psikologi politik. Seseorang memiliki prasangka merupakan tindakan pikiran yang wajar. Hal yang tidak menjadi kewajaran apabila seseorang memiliki prasangka tanpa memiliki data yang akurat. Dengan demikian prasangka yang dilakukan dengan cara tersebut perlu adanya *check and balance*. Tidak semua prasangka menjadi perbuatan yang tidak terpuji. Alasannya karena dengan prasangka pada diri seseorang sebagai sarana kewaspadaan dari perbuatan yang tidak baik. Sebaliknya prasangka yang buruk pada seseorang apalagi berlebihan tanpa ada tindakan *check and balance*, prasangka yang demikian dapat mengakibatkan perilaku-perilaku diskriminatif, agresif, konflik pada individu ataupun kelompok.

## **Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan artikel yang ditulis dari eksplorasi literatur baik jurnal ataupun buku. Artikel ini mengkaji tentang tema prasangka yang melekat pada seseorang dalam kajian psikologi politik. Tema prasangka dalam dunia politik merupakan tema yang sering dipakai oleh para pelaku politik dalam kompetisi politik. Perilaku yang demikian sebenarnya apabila dikaji secara mendalam dapat melahirkan perilaku yang positif dan negatif. Dengan

demikian perilaku prasangka dalam kompetisi politik sebenarnya juga tidak sepenuhnya tidak baik. Permasalahannya dalam perilaku prasangka ada nilai-nilai kewaspadaan dari orang tersebut.

Penelitian literatur masuk pada kategori penelitian kualitatif. kerja peneliti dalam mengerjakan penelitian ini ada beberapa tahap. Pertama peneliti mencari bahan informasi yang berkaitan dengan tema dengan cara mengumpulkan hasil-hasil penelitian baik berupa jurnal ataupun buku. Tahap kedua peneliti mengeksplorasi tema-tema yang sesuai dengan tema yang dipilih peneliti. Tahap ketiga peneliti menganalisis informasi-informasi pengetahuan yang ada pada jurnal ataupun buku yang peneliti dapatkan dan memilihnya sebagai pendukung ataupun yang menolak dengan tema-tema yang peneliti buat secara berulang-ulang. Tahap keempat peneliti melakukan reduksi data yang tidak perlu. Tahap kelima peneliti verifikasi data yang telah peneliti tulis. Tahap keenam peneliti melakukan pembahasan dari temuan tema yang peneliti tulis, dan tahap terakhir peneliti membuat kesimpulan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif dan induktif. Menurut Hadi (Saliyo, 2015, p. 11) bahwa berpikir deduktif merupakan kerja pikiran yang dilakukan seseorang dengan mengambil kesimpulan dari beberapa pernyataan. Kesimpulan yang didapatkan dari kerja seseorang dalam berpikir deduktif adalah dari sesuatu yang general menuju yang khusus. Sebaliknya berpikir induktif merupakan kerja yang dilakukan seseorang dalam pikirannya dengan beberapa pernyataan. Kesimpulan yang diperoleh adalah dari yang khusus menuju pada yang umum.

## Kajian Teori

### *Prasangka*

Pada tahun 1954 fakultas Psikologi sosial di Harvard Gordon Allport menulis buku dan dipublikasikan dengan tema prasangka. Selanjutnya Brilliantly menulis ensiklopedi tentang tema prasangka dalam bentuk buku. Buku tersebut merupakan hasil investigasi permasalahan permasalahan prasangka di era modern dan permasalahan-permasalahan yang alami. Dalam buku tersebut Allport tidak hanya menulis dengan analisis yang tajam permasalahan prasangka, beliau juga menulis tentang perilaku diskriminasi akibat prasangka yang terjadi pada suatu kelompok. Allport dalam buku tersebut juga menulis bagaimana cara menangani perilaku prasangka yang berakibat pada tindakan tidak terpuji. Tidak ketinggalan pula Allport menulis tentang kognitif sosial dan perilaku kelompok untuk mengatasi perilaku prasangka pada eranya yang jauh dari perilaku negatif.

Buku Allport juga di dalamnya dijelaskan tentang permasalahan prasangka yang tidak perlu dilakukan oleh seseorang untuk menghindari adanya konflik ataupun perilaku kekerasan. Ditambah lagi Allport tidak memberikan pernyataan pernyataan yang dilebihkan tentang pengalamannya selama tinggal di Amerika. Selama lebih dari 40 tahun beliau hidup di Amerika pengalaman-pengalamannya dalam kehidupannya juga mewarnai teori yang beliau bangun dalam bukunya.

Lebih dalam lagi mengkaji tentang *prejudice* atau dikenal dengan prasangka, maka lebih baik dan lebih awal mengetahui lebih dalam apa sebenarnya prasangka tersebut. Menurut J.F. Dovidio & S.L. Gaertner dalam bukunya *Prejudice, Discrimination, and Racism*

(1986) menjelaskan bahwa prasangka merupakan tindakan secara implisit ataupun eksplisit yang memberikan kesan yang berbeda pada yang memberikan labeling baik secara jelas ataupun tidak jelas yang melekat pada memori seseorang. J.B.McConahay menjelaskan tentang prasangka bahwa prasangkan terjadi karena adanya hubungan yang menyesatkan antara persepsi dan kognitif seseorang sebagai dasar pandangan yang stereotip dan penyimpangan (Brown, 1950, p. 1).

Menurut Schofield bahwa prasangka seseorang akan mempengaruhi tindakan orang tersebut. Pengaruh tersebut dapat dilihat orang tersebut sebagai subjek ataupun sebagai objek. Persepsi tersebut juga akan berpengaruh terhadap individu ataupun kelompok orang tersebut akibat dari prasangka. Hal yang sama dijelaskan oleh Spaulding menjelaskan bahwa persepsi merupakan sesuatu yang mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu. Setiap individu dalam merespon ataupun memberikan prasangka sesuatu benda dapat berbeda-beda. Permasalahannya karena orang tersebut dalam memberikan prasangka berdasarkan persepsi yang berbeda-beda (Irmawati, 2004, p. 1).

Lebih jelas lagi mengkaji tentang prasangka dapat diambil dari berbagai ilmuwan. Menurut Morales dan Moya menjelaskan bahwa prasangka lebih khusus pada keyakinan, pikiran, perilaku ataupun afeksi yang negatif terhadap kelompok yang lain yang secara jelas ada keberadaannya dan karakter yang dimilikinya. Ilmuwan yang lain seperti Allport mendefinisikan dengan jelas bahwa prasangka merupakan perilaku antipati ataupun pikiran negatif terhadap yang lain. Menurut Buss bahwa prasangka merupakan permusuhan ataupun perbuatan agresi. Simpson dan Yinger mendefinisikan tentang perilaku prasangka lebih kaku yaitu sikap emosional. Istilah sikap akan lebih jelas dan kelihatan pada sikap orang yang memiliki prasangka sebelum mengkonsepsikannya.

Beberapa ilmuwan yang lain mendefinisikan tentang prasangka dengan definisi seperti Asmhore, Devine, & Oskamp bahwa prasangka merupakan fakta dari sikap. Sisi lain sikap merupakan evaluasi pada objek-objek sosial. Yang masuk pada katagori sikap itu bermacam-macam. Sikap tersebut dapat terjadi dari manusia itu sendiri, situasi, dan problem sosial, kelompok sosial ataupun anggota kelompok tersebut. Hubungan antara objek, sikap dan evaluasi masuk pada tiga hal yang terjadi secara simultan dan intesif (Rus & Madrid, 1998, p. 117).

Ulasan di atas sangat jelas bahwa prasangka merupakan bagian dari tindakan psikologis seseorang yang masuk pada pikiran, keyakinan, sikap, emosi yang dapat berakibat pada perilaku. Prasangka juga dapat pada objek fisik seperti kuatnya tubuh, warna kulit, kecantikan dan keburukan. Lebih kuat lagi prasangka merupakan kegiatan yang negatif, apabila prasangka yang muncul pada orang tersebut prasangka yang negatif. Prasangka dapat terjadi pada objek yang individual ataupun kelompok.

### ***Teori Prasangka***

#### **a. Komponen sikap negatif**

Untuk memperjelas antara objek sebagai sikap dengan evaluasi secara simultan dan intens dalam proses terjadinya prasangka dapat dijelaskan dengan tiga komponen. Tiga komponen tersebut yang akan mendukung adanya prasangka pada seseorang individu ataupun kelompok lain. Prasangka yang berlebihan dan dengan sikap yang kurang baik

cenderung akan melahirkan adanya konflik, kekerasan, dan diskriminasi. Sebaliknya prasangka tanpa berlebihan dengan sewajarnya karena adanya persepsi, maka dimungkinkan tidak akan terjadi lahirnya perilaku-perilaku negatif.

Pertama komponen kognitif. Pada komponen ini suatu kelompok dapat memberikan evaluasi pada kelompok yang lain apabila kelompok tersebut mengetahui pengetahuan yang dalam tentang karakter pada kelompok tersebut. Artinya seseorang tidak dilarang memiliki prasangka pada yang lain yang negatif asalkan orang tersebut memiliki data yang jelas. Kondisi yang demikian diperlukan adanya *check and bakance* dalam interaksi perilaku sehari-hari. Apalagi era sekarang era teknologi informasi digital. Hampir setiap detik seseorang akan mendapatkan berita kejelekan seseorang baik bersifat kelompok ataupun individu. Dengan kondisi yang demikian maka sebaiknya kita jangan mudah terprovokasi sebelum mengetahui kebenarannya.

Kedua komponen afektif. Artinya bahwa seseorang dapat melakukan evaluasi yang bersifat positif ataupun negatif kepada orang lain baik pada kelompok ataupun individual. Evaluasi tersebut berdasarkan pada pengalaman ataupun karakter yang dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok. Itulah terjadinya prasangka yang positif ataupun negatif pada orang lain. Dengan demikian seseorang yang memiliki prasangka pada orang lain baik bersifat positif ataupun negatif merupakan sesuatu hal yang lazim. Alasannya bahwa prasangka tersebut berdasarkan pengalaman ataupun pengetahuan karakter yang dimiliki individu ataupun kelompok yang menerima prasangka.

Komponen ketiga komponen konduksi. Artinya bahwa seseorang yang bersikap kepada kelompok ataupun individu merupakan hasil dari kerjasama dari beberapa anggota dalam kelompok tersebut. Maksudnya bahwa prasangka juga dapat terjadi karena adanya kerjasama ataupun interaksi dalam satu komunitasnya sehingga menemukan karakter seseorang sebagai individu ataupun pengalaman-pengalaman yang dianggap baik ataupun tidak baik (Rus & Madrid, 1998, pp. 117–118).

Dengan melakukan telaah secara saksama pada ulasan tersebut dapat dipahami bahwa prasangka dapat terjadi pada tiga katagori. Katagori prasangka tersebut adalah katagori kognitif, katagori afektif dan katagori konduksi. Tiga katagori prasangka tersebut dapat terjadi pada seseorang secara individu ataupun secara kelompok.

## **b. Komponen stereotipe**

Prasangka dengan pandangan stereotip terhadap individu ataupun kelompok yang lain yang jelas keberadaannya menunjukkan pada karakter pada anggota kelompok ataupun individu yang dimilikinya. Karakter tersebut dapat berupa karakter yang positif ataupun karakter negatif. Kerja pikiran seseorang pada prasangka yang demikian merupakan evaluasi seseorang kepada orang lain baik bersifat kelompok ataupun individu. Sebagian besar penelitian tentang prasangka stereotip fokus pada aspek negatif. Aspek tersebut merupakan konotasi atau sinonim dengan prasangka stereotip.

Menurut Katz & Bradley (1933,1935) menjelaskan bahwa prasangka dengan stereotip pada suatu kelompok memiliki aspek keyakinan, evaluasi, dan respon emosional. Konsep prasangka dengan pandangan stereotip berkaitan dengan penyediaan informasi dan penguatan reaksi prasangka emosional pada kelompok yang jelas keberadaannya (Rus & Madrid, 1998, p. 118).

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prasangka stereotip dapat terjadi karena seseorang yang memiliki prasangka pada kelompok ataupun individu yang lain dan orang tersebut mengetahui karakter yang dimiliki pada kelompok ataupun individu tersebut. Prasangka stereotip terjadi karena adanya fanatik yang berlebihan pada kelompoknya dan memiliki respon yang emosional pada kelompok yang lain.

### **c. Komponen keyakinan seseorang**

Prasangka pada orang lain dengan pandangan stereotip berkaitan dengan dimensi kognitif. Prasangka dengan pandangan stereotip tidak berkaitan dengan dimensi afektif dan menolak adanya evaluasi. Menurut P. Devine prasangka stereotip merupakan pengetahuan dari atribut yang dimiliki oleh kelompok atau beberapa kelompok sosial. Sisi lain prasangka keyakinan pada pandangan seseorang secara stereotip pada isi budaya suatu kelompok ataupun keyakinan kelompok. Ada perbedaan antara prasangka stereotip dengan prasangka pada keyakinan seseorang. Keduanya memiliki konsep yang independen. Keduanya terkonstruksi pada konsep kognitif yang berbeda. Perbedaannya prasangka stereotip terjadi karena secara otomatis tanpa ada persepsi yang intens. Prasangka keyakinan terjadi karena ada pembelajaran yang intensif. Pengetahuan tentang keyakinan seseorang terhadap kelompok atau individu yang tidak disenangi ataupun yang disenangi dapat melahirkan prasangka stereotip (Rus & Madrid, 1998, p. 118).

Penjelasan tersebut dapat dicermati dengan perbedaan antara prasangka stereotip dengan prasangka keyakinan yang dimiliki seseorang ataupun kelompok. Prasangka pada keyakinan seseorang terjadi karena adanya proses kognitif yang dilakukan secara intensif. Prasangka tersebut ada proses kegiatan kognitif. Pada prasangka tersebut karena adanya kegiatan pembelajaran.

### **d. Prasangka realistic conflict theory**

Untuk dapat menganalisis prasangka seseorang pada kelompok ataupun individu, maka orang tersebut paling tidak mengetahui teori prasangka yang ada dalam kajian ilmu psikologi. Alasannya agar seseorang dalam mengkaji dapat dengan sempurna hasilnya. Artinya sebagai ilmuwan ketika memperbincangkan permasalahan tentang prasangka orang tersebut dalam melakukan analisis dilakukan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dan dengan dibekali dengan teori prasangka.

Salah satu teori prasangka adalah teori *realistic conflict theory*. Teori tersebut dari Baron dan Byrne. Teori tersebut menjelaskan bahwa awal terjadinya prasangka karena adanya kompetisi sosial pada komoditas ataupun peluang yang ada. Kondisi komoditas ataupun peluang tersebut sedang diperebutkan. Berawal dari kompetisi tersebut baik secara kelompok ataupun individu yang melahirkan adanya konflik.

Menurut teori tersebut bahwa prasangka akan melahirkan konflik karena adanya kurang interaksi dan komunikasi yang baik. Dengan demikian komunikasi dan interaksi yang seimbang yang saling menghargai perbedaan, prasangka dapat dikendalikan tanpa melahirkan bentuk-bentuk tindakan agresif, diskriminatif, dan isolasi. Kondisi yang ada dari teori karena adanya prasangka pada komoditas barang dan peluang, maka orang tersebut apabila saling menghargai dan tidak dengan penuh keserakahan dalam mendapatkan peluang, perilaku diskriminasi, agresi dan isolasi dapat dihindarkan. Dengan kondisi



demikian moral ataupun etika dalam prasangka yang dimiliki seseorang memang penting untuk dipahami dan dilaksanakan setiap orang ketika memiliki prasangka.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2013 menunjukkan bahwa konflik antara etnis Tionghoa dan masyarakat Pendhalungan Situbondo menunjukkan bahwa konflik terjadi karena adanya kecemburuan yang ada pada warga pribumi apabila pendatang mengalami kesuksesan. Konflik tersebut terjadi pada tahun 1967 di Besuki, Situbondo dan Pendhalungan. Selanjutnya pada tahun 1996 konflik antar etnis tersebut juga muncul lagi. Konflik tersebut terjadi dengan berbagai alasan yaitu situasi politik yang tidak menentu, emosi masyarakat mudah tersulut, dan faktor kesenjangan ekonomi (Judhita, 2015, pp. 89– 90).

Ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecemburuan pada komoditas dan peluang karena adanya kompetisi menjadikan prasangka. Prasangka yang demikian dapat mengakibatkan konflik ataupun perilaku negatif. Perilaku negatif tersebut dapat bentuk agresif, diskriminatif, isolatif, dan perilaku menyimpang apabila tidak memiliki dasar moral yang kuat.

## **Pembahasan**

### ***Islam dan Politik***

Islam dan politik dua kata yang terkadang menjadi hal yang tidak dapat disatukannya. Permasalahannya seseorang menempatkan setiap kata tersebut pada makna yang berbeda. Islam sebagai istilah nama yang melekat pada agama dengan penuh kesakralan lebih tepat ditempatkan pada sesuatu perilaku yang berkaitan dengan ibadah. Sisi lain politik tidak memiliki makna yang suci ataupun makna yang sakral yang menjadi keyakinan seseorang. Politik lebih dekat dengan makna strategi ataupun intrik untuk mendapatkan sesuatu. Politik lebih dekat dengan perilaku menghalalkan segala cara untuk memperoleh sesuatu.

Perdebatan tersebut berlangsung lama dan terus terjadi setiap zaman. Bagi seseorang yang meyakini agama hanya berkaitan dengan ibadah, maka orang tersebut akan menjauhi medan pertempuran politik. Sebaliknya apabila seseorang yang meyakini bahwa agama juga bagian dari ajaran yang mengatur Negara dengan keteraturan dan memakmurkan warga negaranya dengan sejahtera, maka orang tersebut akan tetap melaksanakan agama dengan baik dan menjalankan perintah-perintah agama dengan ketaatan serta akan ikut bermain dalam setiap percaturan politik.

Perdebatan yang demikian menurut Abdul Rasyid bahwa teori antara Negara dan pemerintah dalam agama Islam dalam kajian sejarah banyak menjadi isu yang kontroversial. Alasannya karena masalah Negara tidak dibahas secara jelas dalam al-Qur'an. Walaupun keadaan yang demikian Negara merupakan suatu lembaga institusi yang penting dalam komunitas manusia. Sisi lain politik merupakan sarana untuk mengatur manusia dalam komunitasnya. Hal tersebut ada dalam kajian-kajian sejarah manusia.

Perkembangan isu sekarang antara agama atau Islam dan politik menjadi tema yang mutakhir dapat menyatu. Walaupun konsep tentang Negara tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan tradisi sunah Rasul (hadist), namun al-Qur'an merupakan sumber segala sumber yang memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan manusia yang lebih baik. Dengan demikian konsep *nation state* (bangsa dan Negara) dengan istilah *daulah* di Arab.

Perkembangan politik Islam selanjutnya menurut Manzoorudin bahwa istilah Negara dan bangsa dengan kepemimpinan khilafah dan imamah. Kepemimpinan tersebut dimulai sejak zaman khalifah Abu Bakar sampai Usman bin Affan. Sistem pengaturan Negara dengan sistem imamah ataupun khilafah dalam mengatur Negara terjadi pada era khulafaurosyidin. Sistem Negara dengan imamah ataupun khilafah berhenti ketika kekuasaan Usman tumbang pada tahun 1924. Khilafah dalam tata kelola Negara dapat dipahami dengan kepemimpinan satu atau umum untuk semua umat Islam di dunia. Khilafah bertanggungjawab untuk menjalankan hukum Islam di seluruh dunia. Khilafah memiliki padanan makna dengan imamah. Selanjutnya banyak pemerintah yang mayoritas penduduk Islam menganut sistem kerajaan sebagai sarana untuk mengatur Negara (Thaib, 2012, p. 311).

Di era modern di Arab dalam pengaturan Negara berkembang dengan istilah *daulah Islamiyah*. Artinya adalah bahwa pada suatu Negara yang memiliki aturan bahwa Islam sebagai agama Negara. Negara tersebut yang mengambil Islam sebagai azasnya, maka undang-undang yang dibuatnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunah. Istilah tersebut diambil dari al-Qur'an surat Al-Imran (3 : 140). Allah swt berfirman :

*Artinya :Jika kamu pada perang Uhud mendapatkan luka maka merekapun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapatkan pelajaran) dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir dan agar sebagian kamu dijadikanNya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dhalim (Al-Imran, 3 : 140).*

Uraian tersebut merupakan perjalanan perkembangan Islam dan politik secara sederhana. Seiring dengan waktu perjalanan Islam dan politik pada Negara yang sebagian besar warga negaranya muslim. Istilah khilafah ataupun daulah tidak digunakan sebagai pengaturan Negara. Kedua sistem tata kelola Negara tersebut lebih banyak menjadikan konflik dalam Negara itu sendiri. Sebagai contoh Indonesia. Indonesia memiliki warga Negara mayoritas muslim, namun untuk menegakan Negara kesatuan Indonesia tidak cocok dengan dua sistem tata kelola kenegaraan tersebut. Demi persatuan dan persatuan antar suku, agama, budaya, bahasa yang dimiliki warga Negara bangsa Indonesia Negara berazaskan Pancasila. Walaupun tidak dengan label Islam, namun nilai-nilai yang ada pada Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itulah konsensus para pendiri bangsa Indonesia demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Mengkaji pemikiran politik Islam memang asyik dan tidak ada habis-habisnya. Dalam konteks sejarah dapat dibaca bahwa setelah kematian nabi Muhammad saw pada tahun 11M/632 H. Sisi lain hijrahnya nabi dari Madinah (*Muhajirun*) ke Mekah dengan diterima dengan baik oleh penduduk Madinah (*Anshar*) juga merupakan bagian dari pemikiran politik Islam. Pada saat itu ada komunitas baru yang dipimpin oleh nabi Muhammad saw yaitu kaum *Muhajirun* dan *Anshar*.

Abu Bakar dan Umar dua sahabat yang menemani nabi ketika hijrah ke Madinah. Selanjutnya setelah nabi wafat Abu Bakar terpilih sebagai pengganti nabi untuk memimpin umat Islam. Walaupun ada perselisihan pendapat Abu Bakar ditetapkan sebagai khalifah yang berasal dari Mekah dan suku Quraish. Tidak dibantah dan bukan konsensus Ali bin Abi Thalib juga sahabat nabi yang dekat dan turut memperjuangkan agama Islam. Bahkan Ali menjadi menantu Muhammad dengan beristrikan anaknya yaitu Fatimah. Namun alasan mengapa Ali tidak menjadi pengganti nabi Muhammad ketika wafat, karena tidak ada instruksi

dari nabi. Bahkan ketika nabi jatuh sakit menjelang akhir hidupnya yang diminta menjadi imam shalat pengganti nabi adalah sahabat Abu Bakar. Itulah perselisihan kepemimpinan Islam sehingga nanti melahirkan banyak golongan dalam Islam. Golongan golongan tersebut seperti syiah, suni, khawarij, murjiah.

Perkembangan selanjutnya masalah politik dan Islam juga dapat mengkaji pemikir ilmuan Islam seperti Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali pada tahun 505 M/1111H memiliki pemikiran politik Islam tentang kepemimpinan Islam atau sistem tata kelola pemerintahan Islam. Menurutnya bahwa konsep imamah merupakan representasi dari khalifah. Sistem sultan merupakan representasi dari kepemimpinan khalifah yang diberi otoritas untuk memimpin Negara. Menurutnya kekuasaan Negara tidak akan efektif dalam pengaturan Negara apabila tidak memiliki kekuatan politik.

Imamah mendesain kesultanan. Sultan sebagai pelaksana syariah hukum Negara untuk mengelola kenegaraan. Menurutnya imamah dan kesultanan sebaiknya bekerjasama untuk mengelola Negara dengan baik. Teori tentang kepemimpinan Islam imamah dan kesultanan Imam al-Ghazali memiliki tiga aspek. Pertama bahwa kekuatan politik dalam kekuasaan sangat dibutuhkan. Alasannya untuk menegakan perintah pemimpin agar kerja programnya dapat berjalan dengan baik. Aspek kedua struktur pemerintahan membutuhkan simbol secara kolektif dalam komunitas muslim untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan Negara. Aspek ketiga kerja pengelolaan Negara secara institusional ataupun fungsional diambil dari hukum Islam (Saeed, 2006, pp. 121–122).

Penjelasan tersebut sebenarnya apabila dipahami secara mendalam bahwa perjalanan sejarah kepemimpinan Islam juga tidak lepas dari politik. Islam dan politik dalam kekuasaan Negara berjalan saling mendukung, walaupun sistem ketatanegaraan Islam masih menjadi perdebatan. Lebih jelasnya bahwa kepemimpinan tata kelola Negara sesuai dengan kebutuhan dan konsensus warga negaranya. Permasalahannya tata kelola sistem kenegaraannya pada substansinya bagaimana warga Negara dapat hidup aman nyaman dan sejahtera. Islam sebagai agama tidak harus menjadi simbol sistem ketata negaraannya, namun sistem yang dianut dalam suatu Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim tidak kontraproduktif dengan nilai-nilai ajaran agama Islam.

### **Psikologi Politik Islam**

Apabila mengkaji tentang prasangka dalam kajian psikologi politik sebenarnya tema tersebut banyak dipelajari dalam ilmu psikologi. Dikarenakan tema tersebut sering ditemukan dalam kontestasi politik, maka peneliti tertarik untuk menghubungkan dengan kajian psikologi politik. Lebih spesifik lagi kajian tema tersebut peneliti fokuskan dengan kajian psikologi politik Islam. Permasalahannya apakah tema-tema prasangka muncul dalam kajian psikologi politik Islam?. Inilah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan kerja keras para ilmuan psikologi Islam lebih khusus psikologi politik Islam.

Istilah prasangka dalam psikologi politik Islam sebenarnya bukan merupakan istilah yang asing. Dalam psikologi politik Islam dikenal dengan *suu dhon* (prasangka buruk), dan *khusnu dhon* (prasangka baik). Kedua perilaku ini diajarkan pada etika seseorang ketika berinteraksi antara yang satu dengan yang lain. Namun tidak dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari setiap orang berperilaku seperti itu. Apalagi dalam kontestasi politik dalam suatu Negara, perilaku yang demikian terjadi setiap waktu dalam hitungan detik.

Sebenarnya perilaku *suu dhon* ataupun *khusnu dhon* dalam kehidupan sehari-hari merupakan perilaku yang lazim asalkan jangan dilakukan dengan fanatik yang berlebihan. Permasalahannya apabila kedua perilaku dilakukan oleh seseorang dengan fanatik yang berlebihan akhirnya akan melahirkan perilaku penyimpangan. Baik *suu dhon* ataupun *khusnu dhon* apabila berlebihan akan melahirkan dusta. Penjelasan ini diperkuat dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Bukhari (An-Nawawi, n.d., pp. 600–601).

*Artinya : Dari Abi Hurairah RA, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw bersabda : janganlah berprasangka, karena berprasangka lebih banyak percakapan yang dusta. Janganlah merasa mengetahui, memata-matai, berlomba-lomba pada suatu perkara yang berlebihan, saling dengki, dan saling membenci, dan jangan saling mengatur. Jadilah kamu hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Sesama orang Islam adalah saudara. Janganlah saling berbuat dhalim, dan jangan saling membiarkan apabila membutuhkan pertolongan ataupun saling menghina. Ketakwaan ada di sini, ketakwaan ada di sini (Rasulullah menunjukan di dada). Sekiranya ada perkara yang jelek janganlah menghina saudaranya muslim. Setiap muslim dengan muslim haram darahnya, benda-bendanya, dan hartanya (untuk dimusuhi ataupun diganggunya). Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, kemolekannmu, tetapi Allah melihat pada hatimu dan amalmu.*

Lebih jelas lagi bahwa hadis di atas diperkuat dengan firman Allah swt dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat (49 : 12 ).

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang menggunjing dengan sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan dagingnya saudaranya yang sudah mati?. Tentu kamu merasa jijik. Dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang (Al-Hujurat, 49 : 12 ).*

Sesungguhnya dalam paparan ini penulis tidak mengkaji ayat dan hadis di atas secara hukum fikihnya. Untuk lebih jelas lagi bagaimana hukum dari perilaku *suu dhon* dan *khusnu dhon* dapat dibaca dalam kitab *Subulus As-salam*, karya Sayid al-Imam Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani dan Sona'ani Al-Ma'ruf bil Amir (9501 M/2811 H). Kitab tersebut merupakan penjelasan dari kitab *Bulhum Maram*, karya dari Syihabudin Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Al-Kanani al-'Asko. Iani Al-Qohiri juz 4 halaman 189-190. Peneliti hanya mengkaji secara psikologis dengan keterangan-keterangan dalam kitab klasik dengan kitab tersebut dan kitab *Riyadhus As-Sholihin* halaman 600-601. Kitab tersebut karya dari Syekh Al-Islami Muhyidin Abi Zakariya Yahya ibn Syarif An-Nawawi.

Hadist di atas apabila dikaji secara mendalam dalam tata kelola Negara merupakan teori politik memiliki makna yang sangat luar biasa. Apalagi dalam kajian psikologi politik Islam. Psikologi politik Islam mengkaji tentang perilaku-perilaku politik berkaitan dengan kajian etika Islam. Artinya seseorang ketika bermain politik sebagai seorang muslim juga tidak jauh dengan sandaran etika Islam. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga dan merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti hadis “*janganlah berprasangka, karena berprasangka lebih banyak percakapan yang dusta. Janganlah merasa mengetahui, memata-matai, berlomba-lomba pada suatu perkara yang berlebihan, saling dengki, dan saling membenci, dan jangan saling mengatur.*”

Kalau dicermati yang lebih dalam pesan nabi pada hadist tersebut merupakan perilaku supaya jangan dilakukan oleh para pelaku politik cukup beralasan. Permasalahannya karena perilaku yang demikian juga merupakan akar dari adanya konflik. Perilaku yang demikian pada ujung-ujungnya adalah perilaku *divide et impera* (adu domba). Perilaku tersebut merupakan perilaku yang berujung pada perilaku pecah belah. Pesan yang selanjutnya pada

hadist tersebut cukup jelasnya bagi seseorang yang melakukan prasangka dalam percaturan politik akan mengakibatkan adanya rasa *khawatir* ataupun *anxiety* (kecemasan). Kecemasan yang berlebihan yang ada pada seseorang akan mudah menumbuhkan penyakit psikologis dan penyakit biologis bagi pelakunya.

Kandungan makna selanjutnya pada kalimat “*Jadilah kamu hamba Allah yang saling bersaudara sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Sesama orang Islam adalah saudara. Janganlah saling berbuat dhalim, dan jangan saling membiarkan apabila membutuhkan pertolongan ataupun saling menghina. Ketakwaan ada di sini, ketakwaan ada di sini (Rasulullah menunjukan di dada). Sekiranya ada perkara yang jelek janganlah menghina saudaranya muslim. Setiap muslim dengan muslim haram darahnya, benda-bendanya, dan hartanya (untuk dimusuhi ataupun diganggunya). Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, kemolekannmu, tetapi Allah melihat pada hatimu dan amalmu.*”

Cukup jelas bahwa makna arti dari hadist tersebut memberikan pesan kesantunan dalam politik. Ditambah lagi ketakwaan politik, walaupun Rasulullah menjelaskan bahwa ketakwaan ada di dada masing-masing orang. Ada nilai simplisit pesan dalam hadist tersebut yaitu bahwa sesama orang dalam kehidupan politik adalah saudara, hidup gotong-royong, dan saling menjaga keamanannya. Hadist di atas diperkuat dengan firman Allah swt surat Al-Hujurat (49 : 12).

Meminjam teorinya McClelland yang ditulis Minner pada tahun 1992 dalam tulisannya (Saliyo, 2018, pp. 78–80) bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk berprestasi *need for achievement*, kebutuhan untuk berafiliasi *need for affiliation*, dan *need for power* kebutuhan untuk berkuasa. Secara mendalam mencermati hadist di atas memberikan pesan menurut peneliti bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk berprestasi, berkuasa, dan kebutuhan berinteraksi dan berafiliasi dengan sesama manusia. Bedanya kalau dalam hadist tersebut ada pesan kesantunan dalam implemetasi, tetapi dalam teori yang disuguhkan McClelland hanya menyuguhkan tesa kebutuhan manusia.

Meminjam penjelasan prasangka dari keterangan Ibnu Kasir bahwa perilaku prasangka yang dilarang agama adalah perilaku prasangka yang negatif. Perilaku prasangka bagi orang yang beriman yang dijauhi adalah perilaku yang saling melemahkan, mengkhianati, pada keluarga, kerabat, manusia yang tidak pada tempatnya. Permasalahannya perilaku yang demikian dosa, dan berhati-hatilah. Tidak ketinggalan juga pesan yang diberikan oleh Umar bin Khatab sahabat yang memiliki gelar Amirul Mukminin. Jangalah berprasangka dengan kalimat kepada orang yang beriman dengan kalimat selain kalimat kebaikan. Temukanlah kalimat-kalimat yang baik darinya yang keluar dari mulutmu, bukan kalimat-kalimat yang buruk. Berbeda lagi dengan ilmuan Sufyan Astauri. Dia berpendapat bahwa prasangka ada dua. Pertama prasangka yang dapat berujung pada dosa yaitu prasangka buruk yang diucapkan tanpa ada kebenaran. Kedua prasangka yang tidak berdosa yaitu prasangka yang tidak diucapkan (An-Nawawi, n.d., pp. 602–603).

Apabila dikaji secara cermat uraian-uraian penjelasan-penjelasan tersebut cukup mengena sebagai pesan politik dalam kontestasi politik. Apalagi pada bulan-bulan politik. Seorang pemimpin dalam ruang publik umum dalam berprasangka sebaiknya berhati-hati dengan lawan politiknya. Alasannya karena dengan prasangka yang diucapkan di ruang publik yang saling mencela dan menjatuhkan bukan simpati yang diterima oleh pemilih,

tetapi kurang kesantunan dan sikap kurang dewasa. Bahkan sikap dan tutur kata yang demikian dapat dinilai kurang matang dan dewasa dalam memainkan percaturan politik dan emosional. Hal yang lebih gaduh lagi adalah apabila saling menjatuhkan dan berujung pada institusi lembaga hukum.

### **Simpulan**

Teori prasangka dalam politik baik sumber dari psikologi politik Islam ataupun psikologi politik sebetulnya memberikan pesan cantiknya dan etika menerapkan permainan politik dalam kontestasi. Apalagi sumber yang didapatkan dalam al-Qur'an dan hadist, sangat jelas bahwa politik yang bermartabat dewasa dan matang dalam menerapkan pada perilaku sehari-hari adalah politik yang santun.

Kecerdasan, kedewasaan, kematangan dan kesantunan dalam mengoperasikan politik bukan bertarung urat saraf emosi, ataupun perilaku prasangka yang negatif. Sebaliknya kecerdasan, kedewasaan dan kematangan politik ketika seorang aktor politik dapat membaca celah untuk membawa kesejahteraan, keamanan, kenyamanan rakyat dari sisi kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan spiritual dalam kontestasi politik.

### Daftar Pustaka

- An-Nawawi. (n.d.). *Riyadhus As-Sholihin*. Ihyaul Kitab Al-'Arobiyah Indonesia.
- Brown, R. (1950). *Prejudice, Its Social Psychology*. Australia: Blacwell Publishing.
- Crandall, C. S., & Eshleman, A. (1996). *Social Psychology of Prejudice, Historical and Company Issues*. (S. C. Cristian & M. Schaller, Eds.). Kansas: Lewinian Press.
- Irmawati. (2004). *Pengaruh Prasangka Sosial Terhadap Persepsi Kemampuan Kerja Karyawan*. Medan: FISIP USU.
- Judhita, C. (2015). Stereotipe dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makasar. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.12, No.*
- Kaiser, Cheryl, R., & Wilkins, C. L. (2010). Group Identifications and Prejudice : Theoretical and Emperical Advances and Implications. *Journal of Social Issues, Vol.66, NO.*
- Kuncoro, J. (2008). *Prasangka dan Diskriminasi*. Semarang.
- Rus, A., & Madrid, D. (1998). An Overview of Prejudices : Some Spanish Studies. *International Journal of Political Psychology and Political Socialization, vii no. 1 .*
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought*. New York: Routledge.
- Saliyo. (2015). *Islamic Motivation. Proceeding, Konsorsium Keilmuan Psikologi Islam PTKI-PTKIN*. Yogyakarta.
- Saliyo. (2018). *Beragama Rahmatan Lil'alamin*. Yogyakarta: LKiS.
- Thaib, L. (2012). The State in Islamic Political Thought : With Special Refernce to The Position of Non-Muslim as Members of Parliement. *Journal of Advance Social Research, Vol.2, No.*

This page intentionally left blank